



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 546/DJU/OT1.6/III/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lampiran
Hal : Petunjuk Pengusulan Evaluasi
Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di
Lingkungan Peradilan Umum

Jakarta, 13 Maret 2026

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan pengusulan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani agar memedomani Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360/SEK/PW1.1.1/II/2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2026;
2. Bahwa bagi satuan kerja yang akan mengusulkan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2026, agar segera melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas paling lambat tanggal 31 Maret 2026 melalui aplikasi <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id>
3. Bahwa jumlah kuota pengusulan WBK/WBBM pada tahun 2026 di lingkungan Peradilan Umum sebanyak 59 (lima puluh sembilan) satuan kerja, dengan rincian:

Uraian	Jumlah
WBK	
Pengadilan yang diwajibkan	1
Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus/IA	10
Pengadilan Negeri Kelas IB/II	40
WBBM	
Pengadilan yang diusulkan	8

4. Untuk menjamin kualitas penilaian evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2026 di lingkungan Peradilan Umum, diharapkan agar pengadilan tinggi lebih selektif dan objektif dalam mengusulkan pengadilan negeri di wilayah hukumnya untuk mengikuti evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana dalam Lampiran I, dengan mempertimbangkan:
 1. Capaian kinerja per sasaran strategis tercapai;
 2. Tidak terdapat pelanggaran yang dalam proses pemeriksaan atau penjatuhan hukuman disiplin pada tahun 2025-2026;
 3. Terdapat inovasi yang berdampak positif pada pengguna layanan dengan mempertimbangkan:
 - a. Latar belakang/permasalahan dasar yang menjadi alasan dibuatnya inovasi;
 - b. Uraian singkat tentang inovasi dan manfaatnya;
 - c. Tanggal diberlakukannya inovasi
 - d. Jumlah pengguna inovasi
 - e. Komentar/review pengguna layanan terhadap manfaat inovasi
5. Bahwa dalam pengusulan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pengadilan tinggi diharapkan untuk memperhatikan:
 1. Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
 2. Tidak terdapat pelanggaran yang dalam proses pemeriksaan atau penjatuhan hukuman disiplin pada tahun 2025-2026;
 3. Satuan kerja yang diusulkan telah melakukan pendampingan/asistensi terhadap Satuan Kerja/Unit Kerja baik di dalam atau di luar Mahkamah Agung;
 4. Inovasi unggulan satuan kerja telah direplikasi oleh satuan kerja lainnya.
6. Bahwa Pengadilan Tinggi perlu memastikan pimpinan dan seluruh aparatur pada satuan kerja yang diusulkan berintegritas dan solid dalam pembangunan Zona Integritas;
7. Bahwa Pengadilan Tinggi melaksanakan penilaian pendahuluan dengan melakukan verifikasi dan penyaringan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya serta mengusulkan Satuan Kerja yang dinilai layak untuk dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal Mahkamah Agung dan/atau Tim Penilai Nasional berdasarkan urutan peringkat kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui email ketatalaksanaan.badilum@gmail.com dengan contoh subjek "Usulan Satker ZI PT Jakarta 2026" paling lambat **tanggal 2 April 2026**;
8. Bahwa Pengadilan Tinggi selain melakukan penilaian juga melakukan pendampingan terhadap Satuan Kerja yang diusulkan pada wilayah hukumnya;

9. Bahwa nama calon satuan kerja yang telah diusulkan tersebut akan diajukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendapatkan *clearance*;
10. Bahwa untuk pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang belum diusulkan evaluasi pembangunan zona integritas pada tahun 2026, tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan melakukan pemenuhan data dukung pada aplikasi <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id>;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.


Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bambang Myanto

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan Seleksi Administrasi dan Analisis Dokumen, agar memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

Tujuan:

Menentukan kelayakan awal (persyaratan administrasi) pengusulan satuan kerja untuk mengikuti evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri dan WBBM;

Langkah Evaluasi:

Seleksi administrasi dilakukan melalui verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
A.	Verifikasi kelengkapan dokumen pengusulan	
1.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang kebenaran data dukung.	Masing-masing satuan kerja membuat (SPTJM) untuk menerangkan tentang kebenaran data dukung (sebagaimana contoh dalam lampiran 2).
2.	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan hasil penilaian berjenjang (https://pmpzi.mahkama.hagung.go.id)	a) Catatan/penjelasan pada LKE telah diisi penjelasan atas data dukung; b) Tautan data dukung LKE dapat diakses.
3.	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri SPAK & SPKP;	Laporan hasil survei sesuai format/template SE Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025; a) Format Laporan Pelaksanaan Survei; b) Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan di satker; c) Pelaksanaan Survei telah dilaksanakan sesuai pekan survei; d) Kesesuaian data dan tanggal pada laporan Survei dengan visual aplikasi survei e) Terdapat data responden yang dilengkapi dengan nomor kontak yang dapat dihubungi untuk keperluan validasi dan I surveinya.
4.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan (TLHP)	a) TL Hasil Pemeriksaan (BPK) dari masing-masing satuan kerja 100% telah ditindaklanjuti; dan b) TL Hasil Pengawasan Badan Pengawasan melalui Aplikasi WASTITAMA 100% telah ditindaklanjuti

5.	Ikhtisar Pembangunan Zona Integritas	Menyampaikan ikhtisar pembangunan Zona Integritas dari awal pencaangan sampai dengan tahun 2025
----	--------------------------------------	---

Catatan :

Satuan kerja dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi apabila tidak memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan.

2. Analisis Dokumen (*Desk Evaluation*)

Tujuan:

Menentukan kelengkapan dan kelayakan pemenuhan dokumen sebagai data dukung pemenuhan indikator atas pelaksanaan kegiatan Pembangunan ZI pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai persyaratan minimum satuan kerja untuk dapat mengikuti proses evaluasi ZI Menuju WBK secara mandiri Tahun 2026.

Langkah Evaluasi:

Evaluasi/Penilaian substansi LKE atas ketepatan pengisian LKE beserta data dukungnya melalui pengujian dokumen LKE dan Catatan/Penjelasan yang disampaikan yang menjadi fokus evaluator dalam pengujian atas usulan satuan kerja berpredikat WBK dan berpredikat WBBM Tahun 2026.

No.	Komponen	Kriteria/Penjelasan
I	Persyaratan Minimal*	
a.	Pemenuhan persyaratan pengusulan:	
	1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)	1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) adalah TLHP BPK 100% dan Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) adalah TLHP BAWAS melalui Wastitama 100%. Tindaklanjut yang dimaksudkan adalah atas rekomendasi sesuai dan/atau dalam batas kewenangan satuan kerja
	2) Validasi survei	2) Validasi survei dilakukan atas pemenuhan ketentuan pelaksanaan survei (SE Kemenpan RB No. 4 Tahun 2025) antara lain mencakup : a) Laporan survei b) Data responden c) konsistensi informasi (hasil survei pada laporan dibandingkan dengan aplikasi survei serta publikasi di website
	3) Hukuman Disiplin	3) Prinsip umum sebagai prasyarat penilaian atas adanya pelanggaran (penjatuhan hukuman disiplin) yaitu: a) Penjatuhan hukuman disiplin (KUMDIS) pada hakim dan aparatur di satuan kerja

		menunjukkan adanya peristiwa pelanggaran dan menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan belum memadai sehingga satuan kerja belum memenuhi kelayakan untuk mengikuti evaluasi Zona Integritas; b) KUMDIS atas Pelaksanaan WASKAT sebagaimana diatur dalam Perma 8 Tahun 2016, tidak serta merta menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan, tetapi justru mencerminkan bahwa mekanisme pengawasan berjalan dan berfungsi; c) Pelanggaran yang masih dalam proses pemeriksaan dapat menjadi pertimbangan TPI menggagalkan satuan kerja pada tahapan evaluasi; d) Kriteria penjatuhan kumdis mengacu pada: - <i>Lokus</i> yaitu tempat atau lokasi (satker) terjadinya suatu peristiwa pelanggaran dimaksud. - <i>Tempus</i> yaitu waktu terjadinya peristiwa pelanggaran dan/atau Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dikeluarkan dalam periode waktu: 1. Periode pengusulan (T-1) dan 2. Periode pengusulan (T-0)
	4) LHKPN/LHKAN	4) Kepatuhan LHKPN bagi Pejabat wajib LHKPN dan LHKAN (menggunakan SPT) 100% dibuktikan dengan dokumen bukti lapor,
b.	Area Pengungkit:	
	Nilai Minimal Pengungkit	Min. 40 untuk WBK Min. 48 untuk WBBM
	Bobot Nilai minimal per Area Pengungkit	Min. 60% untuk WBK Min. 75% untuk WBBM
c.	Area Hasil:	
	1) Komponen (nilai minimal) "Birokrasi yang bersih dan Akuntabel"	Min. 18,25 untuk WBK Min. 19,50 untuk WBBM

	Nilai minimal sub-komponen "Survei SPAK"	15,75 (indeks 3,60) untuk WBK dan WBBM
	Nilai minimal sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	1) Nilai minimal sub komponen = 2,50 untuk WBK dan 3,75 untuk WBBM; 2) Nilai capaian kinerja berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP terakhir (Nilai B untuk WBK dan BB untuk WBBM); 3) Pemenuhan Capaian indikator kinerja 100% diperhitungan dari capaian kinerja per Sasaran Strategis; 4) Realisasi kinerja atas indikator kinerja "NIHIL" tidak diperhitungan dan/atau tidak mempengaruhi perhitungan capaian kinerja;
	2) Komponen hasil (nilai minimal) "Pelayanan Publik yang Prima"	Min. 14,00 (Indeks 3,2) untuk WBKMin. 15,75 (Indeks 3,6) untuk WBBM
	3) Total Nilai Minimal Pengungkit dan Hasil (A+B)	Min. 75 untuk WBK Min. 85 untuk WBBM
II	Kesesuaian dan Validitas LKE	

* Catatan:

Pemenuhan syarat persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada Point I merupakan prasyarat awal sebelum dilakukan pengujian kesesuaian dan validitas LKE.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia



Bambang Myanto

1. Format Rekap Penyampaian LHKAN

Contoh Format Rekapitulasi Penyampaian LHKAN Unit/Satuan Kerja

Kepada Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
di
Jakarta

Sehubungan dengan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (WBK/WBBM) dan pengusulan (nama unit/satuan kerja) tahun 2023. dengan ini kami sampaikan rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LKHAN) DI (NAMA UNIT/SATUAN KERJA) TAHUN 2023

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	

Demikian rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(Pimpinan Unit/Satuan Kerja)

(Nama)

2. Contoh Format SPTJM

Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kesesuaian dan Kebenaran Data dan Informasi yang Disampaikan dalam Evaluasi ZI

Kepada Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
di
Jakarta

Sehubungan dengan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (WBK/WBBM) dan pengusulan (nama unit/satuan kerja) tahun 2023. Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (Nama jelas pejabat pimpinan unit/satuan kerja)

Jabatan : (Pimpinan unit/satuan kerja)

Alamat : (Alamat unit/satuan kerja)

Menyatakan bahwa setiap data pendukung yang kami sampaikan terkait dengan:

1. Syarat pengusulan unit/satuan kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Data dukung dan informasi pengisian LKE baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kondisi yang berbeda maka kami bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat,tanggal)
Pembuat Pernyataan,
(Pimpinan Unit/Satuan Kerja)

Materai Rp 10.000,-

(Nama jelas pimpinan unit/satuan kerja)

3. Format Ikhtisar Pembangunan ZI menuju WBK

Ikhtisar Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Instansi Pemerintah :

Unit Kerja :

No	Penilaian	Nilai*
I.	Pengungkit (Pemenuhan + Reform) a. Manajemen Perubahan b. Penataan Tata Laksana c. Penguatan Manajemen SDM d. Peningkatan Akuntabilitas e. Penguatan Pengawasan f. Peningkatan Pelayanan Publik	XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100)
II.	Hasil a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Capaian Kinerja lebih baik dan capaian kinerja sebelumnya b. Pelayanan Publik yang Prima 1. Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP)	XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100)

*Nilai diambil dari sheet utama dalam LKE ZI Permenpan 90/2021

PENJELASAN SINGKAT PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK

1. Hasil Konkrit Pembangunan ZI
2. Keterkaitan Pembangunan ZI dengan Isu Strategis Unit/Satuan Kerja
3. Inovasi Unggulan Dalam Penguatan Integritas, Kinerja, dan Layanan

4. Format Ikhtisar Pembangunan ZI menuju WBBM

Ikhtisar Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Instansi Pemerintah :

Unit Kerja :

No	Penilaian	Nilai*
III.	Pengungkit (Pemenuhan + Reform) g. Manajemen Perubahan h. Penataan Tata Laksana i. Penguatan Manajemen SDM j. Peningkatan Akuntabilitas k. Penguatan Pengawasan l. Peningkatan Pelayanan Publik	XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100)
IV.	Hasil c. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 4. Capaian Kinerja lebih baik dan capaian kinerja sebelumnya d. Pelayanan Publik yang Prima 2. Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP)	XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100) XX,XX (1-100)

*Nilai diambil dari sheet utama dalam LKE ZI Permenpan 90/2021

PENJELASAN SINGKAT PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM

1. Hasil Konkrit dari Pembangunan ZI setelah mendapatkan WBK
2. Keterkaitan Pembangunan ZI dengan Isu Strategis Unit/Satuan Kerja
3. Inovasi Unggulan dalam Penguatan Integritas, Kinerja, dan Layanan
4. Inovasi Unggulan Unit/Satuan Kerja yang telah berhasil direplikasi oleh Unit/Satuan Kerja dalam atau luar instansi
5. Unit/Satuan Kerja Lain (Dalam atau Luar Instansi) yang berhasil mendapatkan predikat menuju WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah melakukan Tiru/Pendampingan

5. Format Matriks Resiko

Contoh Format Matriks Risiko

Instansi Pemerintah :
Unit Kerja :

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
1.			
2.			
dst.			

6. Format Survei

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI HASIL PEMBANGUNAN ZI

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Kuesioner Survei

Bab II Metodologi Survei

A. Kriteria Responden

B. Metode Pencacahan

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Bab III Pengolahan Survei

A. Analisis Hasil Survei

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Bab IV Data Survei

A. Data Responden (Nama, No Telepon/HP dan/atau Email)

B. Data Dukung Lainnya



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bambang Myanto

Lampiran III
 Surat Direktur Jenderal
 Badan Peradilan Umum
 Nomor : 546/DJU/OT1.6/III/2026
 Tanggal : 13 Maret 2026

JADWAL PELAKSANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Kategori	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pengisian aplikasi PMPZI oleh satuan kerja	Januari s.d. 31 Maret 2026	Penilaian berjenjang dan Pengusulan WBK/WBBM
Evaluasi dan Pendampingan oleh Pengadilan Tinggi	1 April s.d.10 April 2026	
Pengusulan Rekapitulasi nama Satuan Kerja yang memenuhi kriteria dari Pengadilan Tinggi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	2 April 2026	
Evaluasi dan Pendampingan Satuan Kerja oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	13 April s.d. 24 April 2026	
Penyampaian hasil evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ke Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia	4 s.d 8 Mei 2026	
Evaluasi Internal oleh TPI MA	11 s.d. 22 Mei 2026	
Penetapan calon WBK dan WBBM	22 Mei 2026	
Penyampaian kepada KemenPANRB lewat Portal RB Nasional	22 s.d. 29 Mei 2026	
Pra Evaluasi	22 s.d. 29 Mei 2026	Tahapan Evaluasi dan Penilaian WBK secara Mandiri Tahun 2026
Seleksi Administrasi	1 s.d. 26 Juni 20026	
Analisis Dokumen	29 Juni s.d. 10 Juli 2026	
Wawancara (Virtual)	15 s.d. 31 Juli 2026	
Evaluasi Lapangan (Observasi)	3 Agustus s.d. 25 September 2026	
Panel Final dan <i>Clearence</i>	Oktober 2026	
Penyerahan Predikat	Desember 2026	

Tahapan evaluasi WBBM mengikuti TPN	Sesuai Jadwal TPN 2026	Tahapan Evaluasi dan Penilaian WBBM 2026 oleh KemenPANRB
-------------------------------------	------------------------	--

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia



[Signature]
Bambang Myanto